

**LAPORAN TRANSPARANSI
PELAKSANAAN TATA KELOLA
PT. BPR CATUR ARTHA JAYA
TAHUN 2025**



**JL. Johar, NO. 107, Wergu Wetan, Kudus
TELEPON: 0291446279**

1. Penjelasan Umum Penerapan Tata Kelola

Informasi Umum BPR	
Nama BPR/BPRS	PT. BPR CATUR ARTHA JAYA
Alamat	JL. JOHAR NO. 107 KUDUS
Nomor Telepon	(0291) 446279

Penjelasan Umum:

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG - Good Corporate Governance) di PT. BPR Catur Artha Jaya pada tahun 2025 telah membawa perkembangan yang positif dengan meningkatnya kinerja BPR meskipun menghadapi tantangan yang tidak ringan di sepanjang tahun 2025 di tengah kondisi perekonomian dan sektor usaha yang sebelumnya pulih.

BPR Catur Artha Jaya memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan Tata Kelola sesuai standar Tata Kelola yang telah diatur oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sehingga BPR Catur Artha Jaya dapat terus tumbuh secara berkelanjutan dan memiliki daya saing di industri perbankan khususnya di kota Kudus. Penerapan Tata Kelola yang Baik pada BPR Catur Artha Jaya didukung oleh integritas yang tinggi melalui proses intern yang melibatkan seluruh organ bank baik dari seluruh tingkatan organisasi terutama bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang memiliki peranan sentral serta signifikan dalam penerapan Penerapan Tata Kelola Perusahaan di lingkungan BPR Catur Artha Jaya.

BPR Catur Artha Jaya senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usahanya. Prinsip-prinsip Tata Kelola yang dimaksud adalah Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Independensi dan Kesetaraan. Hal ini didorong oleh komitmen Bank untuk mencapai Visi, yaitu menjadi penyedia layanan perbankan yang terpercaya dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan dukungan SDM yang kompeten untuk menciptakan nilai tambah bagi para nasabah.

Dalam penerapan Tata Kelola, BPR Catur Artha Jaya selalu mengacu pada 3 (tiga) aspek Tata Kelola yaitu Struktur & Infrastruktur, Proses dan Hasil Tata Kelola. Ketiga aspek Tata Kelola tersebut menjadi intisari sekaligus fokus Bank dalam mewujudkan Tata Kelola yang bertujuan untuk melindungi kepentingan Pemangku Kepentingan.

Di sepanjang 2025 dan untuk di tahun mendatang, BPR Catur Artha Jaya terus berupaya untuk mewujudkan hal-hal tersebut melalui penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG) secara konsisten dan berkelanjutan.

Ringkasan Hasil Penilaian Sendiri atas Penerapan Tata Kelola	
Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	3. Cukup Baik

Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola:

Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen BPR.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

1.	Nama	Supriyanto
	Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR. 2. Wajib mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan berlaku. 3. Wajib menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 4. Wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau otoritas lainnya. 5. Dalam rangka melaksanakan Tata Kelola, Direksi wajib menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan: fungsi audit intern, fungsi manajemen risiko dan fungsi kepatuhan. 6. Dalam rangka mendukung terselenggaranya Tata Kelola, Direksi wajib memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai. 7. Wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 8. Wajib mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai Sebagai anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan: 9. Wajib independen dan memenuhi persyaratan: tidak menangani penyaluran dana; dan memahami peraturan OJK serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan. 10. Menetapkan langkah- langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian; memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan perundang- undangan; dan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada OJK. 11. Wajib mencegah Direksi BPR untuk tidak menetapkan kebijakan dan/ atau keputusan yang menyimpang dari peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lain. 12. Wajib melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara berkala kepada Dewan Komisaris. 	
2.	Nama	Pandi
	Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:	
	<ol style="list-style-type: none"> a. Bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan Bank secara profesional dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian Bank, Anggaran Dasar Perusahaan serta ketentuan dan perundangundangan yang berlaku b. Merealisasikan pencapaian target Kinerja Keuangan Bank sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank c. Melaksanakan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate 	

Governance) dengan memperhatikan aspek kecukupan SDM dan kompetensinya.

- d. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Audit Intern BPR, Auditor Ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau Otoritas Lainnya.
- e. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.
- f. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis dibidang kepegawaian kepada pegawai.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris:

- a. Penerapan Tata Kelola telah dilaksanakan secara konsisten dan menerapkan Manajemen Risiko yang efektif dalam setiap kegiatan operasional dan bisnis.
- b. Tingkat Kesehatan Bank telah dipertahankan dalam posisi sehat.
- c. Direksi telah melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia sesuai rekomendasi Dewan Komisaris yaitu : Melakukan evaluasi kinerja minimal periode per semester terhadap seluruh pegawai, Memberikan coaching, mentoring dan pembinaan agar lebih disiplin dalam menerapkan Peraturan Perusahaan. Pemberian sanksi telah dilaksanakan kepada pegawai yang melanggar ketentuan/peraturan yang berlaku. Apresiasi juga telah diserahkan bagi pegawai yang memberikan kontribusi positif bagi BPR Catur Artha Jaya.
- d. Monitor secara ketat debitur yang terdampak dampak COVID-19 sudah dilaksanakan.
- e. Temuan pemeriksaan OJK telah ditindaklanjuti.
- f. Semua temuan Audit Internal telah ditindaklanjuti dan telah diberikan sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait pelaksanaan internal control dalam melaksanakan tugas masing-masing.

3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

1.	Nama	Sinyo Bastian
	Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:	
	Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris Utama adalah sebagai berikut:	
	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi b. Memastikan penerapan Tata Kelola dalam seluruh kegiatan usaha dan operasional Bank c. Memberikan saran atau advis kepada kepada Direksi berkaitan dengan isu- isu strategis dan proses pekerjaan d. Memastikan Direksi telah menindaklanjuti seluruh temuan audit dan rekomendasi dari Audit Intern, Audit Ekstern dan hasil pemeriksaan pengawas Otoritas Jasa Keuangan dan Instansi lainnya. e. Mengkoordinir pembagian tugas Dewan Komisaris. 	
2.	Nama	Agus Tjondro Wijono
	Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:	
	Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris adalah sebagai berikut:	
	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi b. Memastikan penerapan Tata Kelola dalam seluruh kegiatan usaha dan operasional bank 	

- c. Memberikan saran atau advis kepada kepada Direksi berkaitan dengan isu- isu strategis dan proses pekerjaan
- d. Memastikan Direksi telah menindaklanjuti seluruh temuan audit dan rekomendasi dari Audit Intern, Audit Ekstern dan hasil pemeriksaan pengawas (Otoritas Jasa Keuangan) dan Instansi lainnya.

Rekomendasi Kepada Direksi:

- a. Melaksanakan penerapan Tata Kelola secara konsisten dan penerapan Manajemen Risiko yang efektif dalam setiap kegiatan operasional dan bisnis.
- b. Mempertahankan Tingkat Kesehatan Bank selalu dalam posisi sehat.
- c. Secara rutin melakukan untuk pengelolaan sumber daya manusia yaitu : Evaluasi kinerja (minimal periode per semester) terhadap seluruh pegawai, Memberikan coaching, mentoring dan pembinaan serta lebih disiplin dalam menerapkan Peraturan Perusahaan, Mampu bertindak tegas dalam pemberian sanksi bagi pegawai yang melanggar ketentuan/ peraturan yang berlaku dan memberikan reward/ apresiasi kepada pegawai yang memberikan kontribusi positif bagi BPR Catur Artha Jaya.
- d. Memonitor secara ketat debitur yang mengalami tunggakan < 30 hari agar dapat mendeteksi secara dini setiap potensi kegagalan bayar dan dapat mengantisipasinya secara cepat sehingga kredit tidak jatuh pada kolektibilitas 2.
- e. Semua komitmen perbaikan atas temuan pemeriksaan OJK agar segera ditindaklanjuti dan sudah tuntas pada paling lambat bulan Desember 2025.
- f. Menindaklanjuti semua temuan Audit Internal dan segera mengambil langkah-langkah perbaikan kontrol agar tidak terjadi kembali temuan berulang apalagi yang bersifat signifikan.
- g. Melakukan inovasi untuk memanfaatkan teknologi informasi untuk proses kerja maupun akuisisi bisnis.

4. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite**Tindak Lanjut Rekomendasi Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite:**

Sampai dengan saat ini BPR tidak memiliki komite karena modal inti BPR di bawah 80 milyar.

5. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite**Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite:**

Sampai dengan saat ini BPR Catur Artha Jaya tidak memiliki komite karena modal inti BPR di bawah 80 milyar.

6. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada BPR**Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR**

1.	Nama	Supriyanto
	Persentase Kepemilikan (%)	9,00

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	Sinyo Bastian
	Persentase Kepemilikan (%)	25,00
2.	Nama	Agus Tjondro Wijono
	Persentase Kepemilikan (%)	9,00

Anggota Direksi yang memiliki saham pada BPR adalah Direktur Utama, dengan besar persentase 9%.

Kepemilikan saham Bapak Sinyo Bastian sebagai Komisaris Utama sebesar 25% dan Bapak Agus Tjondro Wijono sebagai Komisaris sebesar 9%.

7. Kepemilikan Saham Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada Kelompok Usaha BPR

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Kelompok Usaha BPR

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Kelompok Usaha BPR

1.	Nama	Agus Tjondro Wijono
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT. BPR Adil Jaya Artha
	Persentase Kepemilikan (%)	15,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	15,00
2.	Nama	Agus Tjondro Wijono
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT. Energi Bumi Sakti
	Persentase Kepemilikan (%)	30,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	30,00

Kepemilikan Saham Pemegang Saham BPR/BPRS

1.	Nama	Njoman Agung
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT. BPR Adil Jaya Artha
	Persentase Kepemilikan (%)	25,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	25,00
2.	Nama	Tjandra Njoto Winarso

	Nama Kelompok Usaha BPR	PT. BPR Adil Jaya Artha
	Persentase Kepemilikan (%)	30,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	30,00
3.	Nama	Tjandra Njoto Winarso
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT. Adil Jaya
	Persentase Kepemilikan (%)	46,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	46,00
4.	Nama	Tjandra Njoto Winarso
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT. Bahtera Adi Jaya
	Persentase Kepemilikan (%)	50,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	50,00
5.	Nama	Tjandra Njoto Winarso
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT. Energi Bumi Sakti
	Persentase Kepemilikan (%)	30,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	30,00
6.	Nama	Nuri Wulandari
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT. BPR Adil Jaya Artha
	Persentase Kepemilikan (%)	10,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	10,00

Saham Anggota Direksi, Dewan Komisaris pada Kelompok Usaha BPR adalah sebagai berikut :

Direksi :

Tidak ada saham

Dewan Komisaris :

1. Agus Tjondro Wijono di PT. BPR Adil Jaya Artha, 15 % ; PT. Energi Bumi Sakti, 30%

Pemegang Saham :

2. Tjandra Njoto Winarso di PT. BPR Adil Jaya Artha, 30%; PT. Adil Jaya, 46% ; PT. Bahtera Adi Jaya 50% ; PT. Energi Bumi Sakti, 30%

3. Njoman Agung di PT. Adil Jaya Artha, 25%

4. Nuri Wulandari di PT. Adil Jaya Artha, 10%

8. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

1.	Nama	Agus Tjondro Wijono
	Nama Bank/Perusahaan Lain	PT. Energi Bumi Sakti
	Persentase Kepemilikan (%)	30,00
2.	Nama	Agus Tjondro Wijono
	Nama Bank/Perusahaan Lain	PT. BPR Adil Jaya Artha
	Persentase Kepemilikan (%)	15,00

Saham Anggota Direksi, Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain adalah sebagai berikut :
Direksi :

Tidak ada saham

Dewan Komisaris :

1. Agus Tjondro Wijono di PT. BPR Adil Jaya Artha, 15 % ; PT. Energi Bumi Sakti, 30%

9. Hubungan Keuangan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

1.	Nama	Supriyanto
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
2.	Nama	Pandi
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	Sinyo Bastian
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
2.	Nama	Agus Tjondro Wijono
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

Hubungan Keuangan Pemegang Saham pada BPR

Seluruh Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan berupa menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari Anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau Anggota Direksi BPR atau Pemegang Saham Pengendali BPR.
 Hubungan keuangan anggota Dewan Komisaris pada BPR tidak ada.

10. Hubungan Keluarga Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

1.	Nama	Supriyanto
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
2.	Nama	Pandi
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota	Tidak ada

Direksi Lain di BPR	
Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	Sinyo Bastian
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Njoman Agung - Ayah Kandung, Tjandra Njoto Winarso - Paman (adik dari Ibu kandung)
2.	Nama	Agus Tjondro Wijono
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

Hubungan Keluarga Pemegang Saham pada BPR

1.	Nama	Njoman Agung
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Sinyo Bastian - anak kandung
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Sinyo Bastian - anak kandung Tjandra Njoto Winarso - ipar
2.	Nama	Tjandra Njoto Winarso
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Sinyo Bastian - keponakan
	Hubungan Keluarga Dengan	Sinyo Bastian - keponakan

Pemegang Saham Lain di BPR

Njoman Agung - ipar

Tidak ada hubungan keluarga antar Anggota Direksi pada BPR.
Salah satu anggota Dewan Komisaris menjadi pemegang saham pengendali bank dan memiliki hubungan keluarga dengan pemegang saham lain.

11. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris

1.1. Gaji Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Gaji	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji Direksi (Rp)	Rp909.479.819
Jumlah Komisaris Penerima Gaji	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji Komisaris (Rp)	Rp467.572.981

1.2. Tunjangan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Tunjangan	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tunjangan Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Tunjangan	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tunjangan Komisaris (Rp)	Rp0

1.3. Tantiem Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Tantiem	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tantiem Direksi (Rp)	Rp68.329.125
Jumlah Komisaris Penerima Tantiem	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tantiem Komisaris (Rp)	Rp34.762.875

1.4. Kompensasi berbasis saham Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Kompensasi berbasis saham	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Kompensasi berbasis saham Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Kompensasi berbasis saham	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Kompensasi berbasis saham Komisaris (Rp)	Rp0

1.5. Remunerasi lainnya Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Remunerasi lainnya	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Remunerasi lainnya Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Remunerasi lainnya	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Remunerasi lainnya Komisaris (Rp)	Rp0

2.1. Perumahan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Perumahan (Orang)	2 orang
Jumlah Nominal Perumahan Direksi (Rp)	Rp198.000.000
Jumlah Komisaris Penerima Perumahan (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Perumahan Komisaris (Rp)	Rp0

2.2. Transportasi Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Transportasi (Orang)	2 orang
Jumlah Nominal Transportasi Direksi (Rp)	Rp67.141.246
Jumlah Komisaris Penerima Transportasi (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Transportasi Komisaris (Rp)	Rp0

2.3. Asuransi Kesehatan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Asuransi Kesehatan (Orang)	1 orang
Jumlah Nominal Asuransi Kesehatan Direksi (Rp)	Rp21.201.194
Jumlah Komisaris Penerima Asuransi Kesehatan (Orang)	1 orang
Jumlah Nominal Asuransi Kesehatan Komisaris (Rp)	Rp15.655.606

2.4. Fasilitas Lain-Lainnya Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Fasilitas Lain-Lainnya (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Fasilitas Lain-Lainnya Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Fasilitas Lain-Lainnya (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Fasilitas Lain-Lainnya Komisaris (Rp)	Rp0

12. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah**1. Rasio (a) gaji pegawai yang tertinggi dan (b) gaji pegawai yang terendah**

Rasio (a/b)	5,34 : 1
-------------	----------

2. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji anggota Direksi yang terendah

Rasio (a/b)	1,32 : 1
-------------	----------

3. Rasio (a) gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan (b) gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah

Rasio (a/b)	1,21 : 1
-------------	----------

4. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi

Rasio (a/b)	2,02 : 1
-------------	----------

5. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji pegawai yang tertinggi

Rasio (a/b)	2,21 : 1
-------------	----------

Nihil

13. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

1.	Tanggal Rapat	21 Februari 2025
	Jumlah Peserta	2 orang
Topik/Materi Pembahasan:		
<ol style="list-style-type: none"> Evaluasi Laporan keuangan posisi 31 Januari 2025, Agar Direksi lebih meningkatkan penjualan kredit secara prudent dan pengetatan biaya dengan skala prioritas dan komparasi harga dalam pembelian barang Rasio NPL, 30.31%, direksi diharapkan menindaklanjuti menekan rasio NPL, fokus terhadap kredit bermasalah dan komunikasi intens dengan BPR leader untuk merumuskan penyelesaian Rasio NPL kredit Sindikasi AYDA segera dilakukan langkah-langkah penjualan, aktif menawarkan kepada calon pembeli baik secara langsung maupun lewat medsos dan berharap dapat terjual dengan baik dengan harga optimal 		
2.	Tanggal Rapat	16 April 2025
	Jumlah Peserta	2 orang
Topik/Materi Pembahasan:		
<ol style="list-style-type: none"> Evaluasi Laporan Keuangan BPR Triwulan I khusus rasio NPL, direksi diminta segera monitoring proses penyelesaian debitur NPL dengan lebih intensif Pertumbuhan kredit Triwulan I tidak tercapai, direksi mengevaluasi strategi penjualan kredit agar target pertumbuhan kredit Triwulan II sesuai dengan RBB AYDA akan berumur 3 tahun, menggerus modal inti berdampak penurunan KPMM dan BMPK, terus dimonitoring 		

	4. Evaluasi laporan keuangan Neraca dan L/R , agar perolehan laba tetap meningkat dr pendapatan bunga kredit, penyelesaian kredit bermasalah dan pengendalian biaya	
3.	Tanggal Rapat	04 Juli 2025
	Jumlah Peserta	2 orang
	Topik/Materi Pembahasan:	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menindaklanjuti meeting dengan pengawas OJK secara online, terkait rasio KPMM dibawah 12% diminta lap action plan terhadap AYDA yang belum terjual, CKPN lebih kecil dr PPKA akibat kredit macet dan lap keuangan masih rugi 2. per 31 mei 2025 dan 30 juni 2025 NPL masih 30% an, mendesak BPR Leader utk menyelesaikan kredit sindikasi bermasalah dan kredit macet retail penyelesaian dengan segala cara dan evaluasi dilapangan 	
4.	Tanggal Rapat	25 Juli 2025
	Jumlah Peserta	2 orang
	Topik/Materi Pembahasan:	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan SDM, terhadap personil yang melanggar Peraturan perusahaan dan tidak melaksanakan komitmen pakta integritas 2. Dekom memandang perlu merivisi / menambah kebijakan dalam khususnya perekrutan pegawai BPR sebagai implementasi pelaksanaan tata kelola yang baik 3. Pengembalian dana cadangan imbalan kerja pengurus dan pembinaan sebagai tindakan efisiensi terhadap beban operasioanal (Beban Barang dan jasa; BTK; Asuransi kesehatan lain; biaya pelatihan dan pendidikan pegawai; pembelian mobil) 	
5.	Tanggal Rapat	19 September 2025
	Jumlah Peserta	2 orang
	Topik/Materi Pembahasan:	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Laporan keuangan dan TKS BPR posisi 31 Agustus 2025, terkait pertumbuhan kredit, NPL dan laba 2. Perbaikan rasio ROA dan rasio BOPO belum cukup signifikan tapi tetap pertahankan perbaikan dengan selalu efisiensi pengeluaran biaya, dan opsi penyelesaian NPL kredit sindikasi 3. Pengawasan Audit internal disemua lini bisnis dan operasioanal ditingkatkan dan peran aktif bagian kepatuhan dan Manajemen risiko berperan aktif kampanye kepatuhan dan mengantisipasi risiko risiko yang melekat di BPR 	
6.	Tanggal Rapat	17 Oktober 2025
	Jumlah Peserta	2 orang
	Topik/Materi Pembahasan:	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil diskusi dengan pemegang saham, batas waktu penyelesaian kredit bermasalah Sindikasi 31 Desember 2025 2. Direksi sgera diminta solusi dan rencana penyelesaian kredit sindikasi dengan leader BPR Blora Artha, BPR Buana Artha lestari, BPR Guru Jateng dan BPR Enggal 	

	Makmur Adi Santoso	
7.	Tanggal Rapat	28 Oktober 2025
	Jumlah Peserta	2 orang
	Topik/Materi Pembahasan:	
	1. Pembahasan Tindak lanjut Komitmen direksi atas perbaikan rasio KPMM dalam action plan selama 3 bulan (Juli, Agustus dan September 2025)	
	2. Meminta Direksi untuk melakukan efisiensi agar beban operasional tidak menggerus laba	
8.	Tanggal Rapat	20 November 2025
	Jumlah Peserta	2 orang
	Topik/Materi Pembahasan:	
	1. Pelaksanaan Program APU-PPT & PPPSPM ,DTTOT oleh Direksi dan evaluasi atas rencana pengkinian data Nasabah	
	2. Mengarahkan Perumusan RBB tahun 2026 harus didasarkan pada strategi "Kualitas sebelum Kuantitas" dengan fokus utama perbaikan permodalan dan efisiensi operasional	

Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat 8 (Delapan) kali dalam setahun di sepanjang tahun 2025.

14. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dalam Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) Tahun		
1.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Sinyo Bastian
	Frekuensi Kehadiran (Fisik)	8 kali hadir
	Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi)	0 kali hadir
2.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Agus Tjondro Wijono
	Frekuensi Kehadiran (Fisik)	8 kali hadir
	Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi)	0 kali hadir

Sepanjang tahun 2025, Dewan Komisaris telah mengadakan rapat sebanyak 8 (Delapan) kali dan selalu dihadiri oleh semua anggota Dewan Komisaris.

15. Jumlah Penyimpangan Intern (Internal Fraud)

1.1. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Anggota Direksi	
Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus

Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

1.2. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Anggota Dewan Komisaris

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

1.3. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Pegawai Tetap

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
--------------------------------	----------------

Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

1.4. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Pegawai Tidak Tetap

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

Sepanjang tahun 2025 tidak terdapat penyimpangan atau kecurangan intern, baik yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi maupun pegawai di BPR Catur Artha Jaya.

16. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

1.1. Permasalahan Hukum yang Telah Selesai

Permasalahan Hukum Perdata yang Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0 kasus
Permasalahan Hukum Pidana yang Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0 kasus

1.2. Permasalahan Hukum yang Dalam Proses Penyelesaian

Permasalahan Hukum Perdata yang Dalam Proses Penyelesaian	0 kasus
Permasalahan Hukum Pidana yang Dalam Proses Penyelesaian	0 kasus

17. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

1.	Nama Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Njoman Agung
	Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Pemegang Saham
	Nama Pengambil Keputusan	Supriyanto
	Jabatan Pengambil Keputusan	Direktur Utama
	Jenis Transaksi	Sewa Gedung Kantor Pusat
	Nilai Transaksi	Rp840.000.000

Keterangan:

Biaya sewa gedung Kantor Pusat di Jalan Johar merupakan jalan protokol di Kabupaten Kudus telah dilakukan analisa perbandingan sewa gedung di sekitarnya. Hasil analisa sesuai dengan nilai kewajaran

Risiko benturan kepentingan dapat dimitigasi.

18. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

1.	Tanggal Pelaksanaan	30 Januari 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial

	Penerima Dana	DPD Perbarindo jateng
	Penjelasan Kegiatan	Perbarindo peduli Donasi Banjir untuk Pekalongan & daerah sekitarnya
	Jumlah (Rp)	Rp1.000.000
2.	Tanggal Pelaksanaan	14 Februari 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Panti Asuhan Samsah Kudus
	Penjelasan Kegiatan	Sodaqoh atau Bantuan Dana
	Jumlah (Rp)	Rp2.000.000
3.	Tanggal Pelaksanaan	14 Februari 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Panti Asuhan Budi Luhur Kudus
	Penjelasan Kegiatan	Bantuan dana / Shodaqoh
	Jumlah (Rp)	Rp2.000.000
4.	Tanggal Pelaksanaan	14 Februari 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Hore Djakarsi;Frian Y; Yuyun A; M. Rizki A; Agan W; M.Budiawan ; Wibbi N.L ; Rizky S ; Chabib L
	Penjelasan Kegiatan	Bantuan Sembako karyawan
	Jumlah (Rp)	Rp5.986.590
5.	Tanggal Pelaksanaan	05 Juni 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Panitia Qurban Mushola Ishlakul Ummah Perum Pankis Griya
	Penjelasan Kegiatan	Kurban Hari Raya Idul Adha
	Jumlah (Rp)	Rp3.900.000

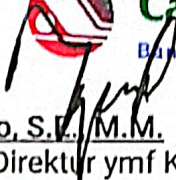
BPR Catur selama tahun 2025 melakukan kegiatan sosial, Donasi Banjir, Qurban Idul Adha dan Bantuan ke Panti asuhan dll

Demikian Laporan Ini dibuat yang menjadi transparansi PT. BPR Catur Artha Jaya untuk tahun 2025. Demikian kami sampaikan atas perhatian serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kudus, 15 April 2026

PT. BPR Catur Artha Jaya




Supriyanto, S.E., M.M.
Direktur Utama dan Direktur ymf Kepatuhan



S. Bastian, S.TP.
Komisaris Utama